

- 02** GOVERNMENT TODAY
Banyak Catatan soal Makan Bergizi Gratis, Prabowo Sidak Dapur di Rawamangun
- 05** NUSANTARA
Bantah LPG 3 Kg Langka, Bahlil Duga Ada yang Borong dan Mainkan Harga
- 08** FAMILY
Buah Namnam, Superfood Alami dengan Segudang Khasiat



Besaran Tukin Dosen ASN

(Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 447/P/2024)



Asisten Ahli (Kelas Jabatan 9)

Rp 5.079.200



Lektor (Kelas Jabatan 11)

Rp 8.757.600



Lektor Kepala (Kelas Jabatan 13):

Rp 10.936.000



Profesor (Kelas Jabatan 15)

Rp 19.280.000

DOSEN TUNTUT TUKIN, PEMERINTAH BERGEMING

Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat (Jakpus), Senin (3/2/2025). Mereka menuntut haknya yaitu tunjangan kinerja (tukin) 2020-2024 agar segera dibayarkan. Aksi mogok nasional diserukan bila permintaan tersebut diabaikan. Para dosen ASN juga akan mengajukan gugatan ke PTUN. Namun pemerintah tampaknya memilih bergeming. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) Togar M. Simatupang menegaskan pembayaran tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN dalam kurun waktu 2020-2024 tidak bisa dirapel pada tahun ini atau waktu yang akan datang. Hal tersebut tidak memenuhi proses birokrasi atau kepatuhan yang lengkap, serta tak dapat diulang akibat tutup buku. Sebagai gantinya, sudah disetujui anggaran tukin bagi dosen ASN pada 2025 sebesar Rp2,5 triliun oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI. Menurut hitungan, angka tersebut sebenarnya hanya bisa mengakomodir tukin untuk sepertiga dari seluruh dosen ASN yang berjumlah 80.000-an orang. Diketahui, pembayaran tukin diatur dalam UU No 15 Tahun 2014 tentang ASN. Aturan turunannya yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) No 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN sebagai dasar pembayaran tukin dosen ASN. Bahkan untuk tukin 2025 sebenarnya juga belum diketahui kapan pencairannya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kepmendikbudristek) No. 447/P/2024, dosen ASN seharusnya mulai menerima tukin pada awal tahun ini. Namun, perubahan nomenklatur Kemendikbudristek ke Kemdiktisaintek memicu keruwetan baru.

Baca Hal 11....



Foto : istimewa

Simulasi Jumlah Tukin yang Belum Dibayarkan dari 2020-2024

Asisten Ahli:

Rp 5.079.200 x 48 bulan =
Rp 243.801.600 per orang

Lektor:

Rp 8.757.600 x 48 bulan =
Rp 420.364.800 per orang

Lektor Kepala :

Rp 10.936.000 x 48 bulan =
Rp 524.928.000 per orang

Profesor:

Rp 19.280.000 x 48 bulan =
Rp 925.440.000 per orang

Banyak Catatan soal Makan Bergizi Gratis, Prabowo Sidak Dapur di Rawamangun

JAKARTA—Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk program makan bergizi gratis (MBG) di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (3/2/2025) pagi.

Keterangan resmi dari Tim Media Presiden Prabowo menyampaikan bahwa presiden terlebih dahulu mengunjungi SD Negeri 05 Jati dan TK Negeri 02 di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur pada pukul 09.38 WIB sebelum sidak.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan hal itu sebagai komitmen Presiden Prabowo untuk terus melakukan perbaikan. Presiden juga sudah menerima dan membaca sejumlah keluhan terkait pelaksanaan program yang belakangan ini menjadi perhatian publik.

Muzani menyampaikan hal tersebut setelah pertemuannya dengan Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/2/2025).

Muzani mengungkapkan salah satu keluhan yang diterima Prabowo terkait keterlambatan distribusi makanan di beberapa wilayah. Selain itu, ada juga keluhan mengenai porsi lauk yang dinilai terlalu kecil dan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam program tersebut.

"Catatan itu misalnya keterlambatan yang terjadi di beberapa tempat, beliau juga menyampaikan ada beberapa lauk terlalu kecil dan semuanya beliau ikuti semua pandangan dan catatan yang disampaikan masyarakat terhadap program ini," ujar Muzani.

Muzani menambahkan Presiden Prabowo menanggapi keluhan tersebut dengan serius dan berkomitmen untuk melakukan sejumlah perbaikan. Prabowo menyadari program makan bergizi gratis memiliki perhatian yang sangat besar dari masyarakat sehingga perbaikan harus segera dilakukan agar program ini berjalan lebih baik di masa depan.

"Beliau menganggap semua catatan dan pandangan yang disampaikan oleh masyarakat sebagai upaya perbaikan bagi pelaksanaan program makan bergizi yang tingkat atensi dan perhatiannya begitu besar diberikan oleh masyarakat terhadap program ini," kata Muzani.

Anggaran Daerah untuk Perbaikan Sekolah

Terpisah, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait anggaran daerah. Tito mengatakan Prabowo meminta agar dana pendidikan di daerah tidak digunakan untuk



Presiden Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur di Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (3/2/2025). (Tangkapan Layar Tim Media Presiden Prabowo)

program makan bergizi gratis (MBG).

Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR di gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Senin (3/2/2025). Tito mulanya mengatakan terdapat beberapa daerah yang sudah menganggarkan program MBG.

Tito mengatakan program MBG akan dilakukan secara sentralistik oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Tito mengatakan Prabowo meminta agar dana pendidikan tidak dipakai untuk program MBG.

"Oleh karena itu perintah Bapak Presiden kepada kami untuk anggaran yang di daerah ini yang semula menganggarkan untuk makan bergizi gratis, itu lebih baik difokuskan pada perbaikan sekolah," kata Tito.

Tito mengatakan Prabowo tidak ingin setiap daerah terdapat MBG, tapi

tidak memiliki ruang belajar yang layak. Terutama, pemerintah sangat menyoroti toilet sekolah.

"Karena sekolah jangan sampai buat dapur, kemudian sekolahnya, ruang utamanya malah tidak bagus, bocor dan lain-lain, kemudian kelengkapan sekolah, kursinya miring-miring, terutama sangat beliau menekankan sekali masalah toilet itu menjadi atensi kami. Toilet semua sekolah SD, SMP, SMA, harus baik," sambungnya.

Tito mengatakan Kemendagri telah berdiskusi dengan BGN terkait program MBG. Tito mengatakan daerah dapat menjadi mitra sebagai satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk program MBG yang akan disewa oleh BGN.

"Kedua, mendorong masyarakat untuk mengintensifkan suplai yaitu

peternak kemudian menanam untuk suplai kepada satuan pelayanan tadi," jelasnya.

Tito kembali menekankan agar dana pendidikan daerah tidak digunakan untuk program MBG. Tito menegaskan dana tersebut akan digunakan khusus untuk perbaikan sekolah. (din, tar, ist, rls, kum/dya)

UPAYA PERCEPATAN PERLUASAN MANFAAT MBG UNTUK SDM UNGGUL

TARGET AWAL	JUMLAH SPPG
Jan 2025	220
Des 2025	5500
Moderat Des 2025	Moderat 15.000
Optimis 2025	Optimis 28.000

CAKUPAN SPPG
3000 Penerima
3000-4000 Penerima
Moderat 3000 Penerima
Optimis 3000 Penerima

TARGET PENERIMA
589.902 Siswa, Ibu Hamil & balita
15.5 jt Siswa, 2.4 jt Ibu Hamil & Balita
Moderat 40 Juta Siswa, Ibu Hamil & balita
Optimis 82.9 Juta Siswa, Ibu Hamil & balita

ANGGARAN	Kondisi Eksisting
71 Triliun	Target Awal
71 Triliun	Simulasi Opsi Perluasan
Moderat 71 Triliun	
Optimis 100 Triliun	

Menko Pangan

Targetkan 82 Juta Penerima MBG di 2025

BANYUWANGI—Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menargetkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjangkau hingga 82 juta penerima manfaat pada 2025. Target ini akan tercapai jika pemerintah mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp140 triliun.

Hal tersebut disampaikan Zulhas saat meninjau langsung pelaksanaan perdana MBG di SMPN 2 Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Senin (3/2/2025). Pada kesempatan tersebut, sebanyak 828 siswa menikmati makan siang bergizi gratis dengan menu dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), berupa ayam asam manis, cap cay, pisang, dan susu.

"Saya lihat Banyuwangi sudah siap melaksanakan program makan siang gratis. Ini program prioritas Presiden untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan gizi yang baik," kata Zulhas, didampingi Bupati Banyuwangi, Ipu

Fiestiandani.

Zulhas menjelaskan pada tahap awal, program MBG akan menasar 15 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Namun, jika tambahan anggaran disetujui, jumlah penerima manfaat bisa meningkat drastis.

"Kalau nanti September atau Agustus ada tambahan anggaran Rp140 triliun, maka kami akan bisa menjangkau lebih dari 82 juta penerima manfaat," katanya.

Menurutnya, program MBG ini merupakan langkah besar untuk menyiapkan generasi unggul dengan memastikan kebutuhan gizi anak-anak terpenuhi.

"Ini adalah investasi untuk masa depan. Dengan gizi yang cukup, anak-anak bisa tumbuh lebih sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan ke depan," jelasnya.

Zulhas juga mengakui bahwa masih ada berbagai aspek yang perlu diperbaiki dalam implementasi program ini. Namun, hal tersebut tidak menjadi

hambatan bagi pemerintah untuk menjalankan MBG secara bertahap.

"Tentu program ini akan terus dievaluasi. Mulai dari standarisasi gizi hingga proses penyajiannya agar semuanya berjalan optimal," katanya.

Di Banyuwangi, program MBG dilaksanakan bertahap. Pada pelaksanaan perdana, dapur SPPG di Kecamatan Rogojampi menyediakan 1.005 porsi makanan untuk anak-anak dari jenjang TK hingga SMP di wilayah sekitarnya. (mok, ant, rls/dya)

Pelantikan Kepala Daerah Nongugatan-Dismisal Serentak DPR-Pemerintah Sepakat, Mendagri: Presiden Memilih 20 Februari

JAKARTA-Kemendagri, Komisi II DPR RI, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP telah sepakat pelantikan kepala daerah terpilih di Pilkada 2024 non sengketa akan dilaksanakan secara serentak. Namun, tanggalnya belum ditentukan.

Namun ada sinyal, Presiden Prabowo memilih pada 20 Februari 2025 mendatang. Diketahui, kewenangan untuk menentukan tanggal pelantikan, yakni Presiden Prabowo melalui Perpres.

Rapat ini sendiri dilaksanakan di ruang rapat Komisi II DPR RI, gedung Parlemen, Jakarta pada Senin (3/2/2025), dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengusulkan tanggal 20 Februari 2025 sebagai tanggal pelantikan, sesuai pilihan presiden Prabowo Subianto.

“Dan saya melapor kepada bapak presiden dan bapak presiden menyampaikan, beliau memilih tanggal 20, hari kamis, tanggal 20,” tutur Tito.

“Masalah tempatnya sedang dibicarakan, tapi yang jelas di ibukota negara (menurut Tito, Jakarta),” sambungnya.

Namun, tanggal itu tak jadi ditetapkan oleh Tito. Menurutnya, tanggal akan fleksibel saja. “Saran kami diambil fleksibel saja, meskipun di sini kami sudah, statement kami sampaikan tanggal 20, kita nggak tahu terjadi force major. Force major nggak tahu lah ya, apakah mungkin, ya mudah-mudahan nggak terjadi bencana banjir atau segala macam ya yang mungkin menghambat,” jelasnya.

Mengenai tanggal pelantikan pun masih akan ditetapkan selanjutnya dan akan diumumkan oleh Tito di kemudian hari.

Sebelumnya, penetapan tanggal 6 Februari sebagai tanggal pertama pelantikan kepala daerah diundur oleh Mendagri. Alasannya, pembacaan dismissal oleh Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pilkada bersengketa dibacakan pada tanggal 3-5 Februari.

Adapun pelantikan kepala daerah hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 yang masih dalam proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di MK dilaksanakan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK RI) berkekuatan hukum, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Sengketa Pilkada di MK meliputi pemeriksaan pendahuluan pada 8-16



Mendagri Tito Karnavian bersama dua wakil menternya, yakni Bima Arya Sugiarto dan Ribka Haluk di Ruang Komisi II DPR, gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2025). Ist

Januari 2025. Tahap akhir Sidang Pengucapan Putusan Sengketa Pilkada digelar pada 7-11 Maret 2025. Jadwal tersebut disesuaikan dengan tenggat waktu MK memutus perkara sengketa Pilkada. Berdasarkan Pasal 56

Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024, perkara Perselisihan Hasil Pilkada diputus MK dalam tenggang waktu paling lama 45 hari kerja sejak permohonan diregistrasi. (din, ist, wid, ant/dya)

KPU Keluhkan Jadwal Pemilu dan Pilkada 2024 Terlalu Mepet

KETUA Komisi Pemilihan Umum atau KPU Mochammad Afifuddin mengeluhkan penyelenggaraan pemilu presiden dan legislatif yang terlalu mepet dengan pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024.

Afif mengatakan jarak waktu yang terlalu dekat antara keduanya memperberat beban kerja bagi penyelenggara pemilu. “Tantangan pilkada serentak 2024, dalam catatan penyelenggaraan kami, pertama jarak waktu yang terlalu dekat antara penyelenggaraan pemilu serentak dengan pilkada serentak,” kata Afif dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) di gedung parlemen, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Menurut Afif, tahun lalu para penyelenggara pemilu harus mengurus tahapan pemilu serentak yang belum seluruhnya selesai sekaligus tahapan pilkada yang baru saja dimulai. Pemilu presiden dan legislatif berlangsung pada 14 Februari 2024 sedangkan pilkada dilaksanakan pada 27 November 2024.

Tahapan pemilu yang berturut-turut ini, kata Afif, memaksa para penyelenggara pemilu mengerahkan daya konsentrasi yang lebih. “Ini mau tidak mau menambah daya konsentrasi yang harus kami lakukan, terutama jajaran penyelenggara permanen tingkat provinsi kabupaten/kota,” ujarnya.

Selain itu, bahan evaluasi lainnya dari KPU tentang penyelenggaraan pemilu tahun lalu adalah tentang cuaca. Kondisi cuaca tidak menentu yang diiringi banyak curah hujan di akhir tahun – sekitar Oktober dan November – disebut berkontribusi pada logistik pemilu. Afif mengatakan distribusi surat suara menjadi terhambat karena faktor ini.

Ketua KPU itu juga mengeluhkan Akhir Masa Jabatan (AMJ) Anggota KPU provinsi dan kabupaten/kota. Ia mencontohkan kasus di Lampung, ketika para anggota KPU di sana berakhir masa jabatannya enam hari menjelang pemungutan suara. Menurut Afif, hal ini turut berkontribusi pada “situasi konsolidasi di internal” KPU.

“Jadi pada intinya, beban kerja penyelenggara menjadi lebih berat,” kata dia, menyimpulkan evaluasi dari

Kesimpulan Rapat soal Pelantikan Kepala Daerah:

- Pelantikan serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 untuk Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak terdapat sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK RI), dan berdasarkan hasil Putusan/Ketetapan Dismisal MK RI, serta telah ditetapkan oleh KPU dan diusulkan oleh DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Presiden Republik Indonesia atau Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, akan dilaksanakan pelantikan serentak oleh Presiden Republik Indonesia di Ibukota Negara. Namun, pelantikan ini tidak berlaku untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta seluruh kepala daerah di Provinsi Aceh, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 yang masih dalam proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK RI) akan dilaksanakan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK RI) berkekuatan hukum tetap, dengan tetap memperhatikan prinsip pelantikan yang secepatnya dan prinsip keserentakan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Meminta kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia untuk mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia agar melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota.
- Terkait agenda Evaluasi Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024, pendalaman lebih lanjut akan dilakukan dengan menyesuaikan jadwal agenda Komisi II DPR RI yang berikutnya.

KPU. Afif membenarkan pihak-pihak yang mengusulkan agar pilpres dan pileg tidak diselenggarakan di tahun yang sama dengan pilkada. Alasannya adalah supaya tidak terjadi irisan antara tahapan keduanya, ketika penyelenggara pemilu masih mengurus pilpres dan pileg di waktu pilkada sudah dimulai.

Ia menduga hal ini tidak hanya menyulitkan penyelenggara pemilu, tetapi juga para politikus yang mempersiapkan diri untuk pemilu. “Ini tidak hanya merepotkan penyelenggara – bagi bapak-ibu di partai juga demikian. Membangun koalisi, berkomunikasi dengan banyak pihak, dan seterusnya,” kata dia. (wid, ant/dya)

Penurunan Tajam Tarif Listrik jadi Penyumbang Utama Deflasi Januari 2025

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sepanjang Januari 2025 terjadi deflasi sebesar 0,76 persen secara bulanan (mtm) dan inflasi 0,76 persen secara tahunan (yoy).

Pendorong utamanya adalah penurunan tarif listrik. Diketahui ada diskon 50% bagi pelanggan dengan daya listrik hingga 2.200 VA pada bulan tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widayanti, menjelaskan bahwa secara keseluruhan, inflasi bulan ke bulan (month-to-month/mtm) mengalami penurunan akibat deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah.

"Komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 7,38%, dengan andil terhadap deflasi mencapai 1,44%. Komoditas utama yang berkontribusi adalah tarif listrik, angkutan udara, dan kereta api," ujar Amalia dalam konferensi pers, Senin (03/02/2025).

Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 2,95%, dengan andil inflasi mencapai 0,48%. Komoditas yang paling berpengaruh dalam kenaikan harga ini adalah cabai merah, cabai rawit, dan daging ayam ras. Di sisi lain, komponen inti mengalami inflasi sebesar 0,30% dengan andil 0,20%, yang didorong oleh kenaikan harga minyak goreng, emas perhiasan, biaya sewa rumah, kopi bubuk, mobil, dan sepeda motor.

Dari segi wilayah, sebanyak 34 dari 38 provinsi di Indonesia mengalami deflasi, sementara 4 provinsi lainnya mencatat inflasi. Deflasi terdalam terjadi di Papua Barat sebesar 2,29%, sedangkan inflasi tertinggi tercatat di Kepulauan Riau sebesar 0,43%.

Sinyal Bahaya

Terpisah, sejumlah ekonom menilai deflasi 0,76% secara bulanan (month-to-month), yang terdalam sejak September 1999, menandakan adanya tekanan pada perekonomian Indonesia.



(Ilustrasi) Kebijakan pemerintah untuk memberikan diskon tarif listrik hingga 50% menyebabkan terjadinya deflasi. Ist

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rizal Taufikurrahman mengatakan, secara umum deflasi dapat menjadi indikasi melemahnya daya beli masyarakat. Terutama, kata dia, jika disebabkan oleh turunnya permintaan agregat akibat ketidakpastian ekonomi atau stagnasi pendapatan.

"Jika tren ini berlanjut, maka bisa berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi karena bisnis dan industri akan mengalami tekanan akibat rendahnya konsumsi," ujar Rizal saat dihubungi, Senin (3/2/2025).

Dikonfirmasi secara terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai deflasi tidak hanya terjadi karena adanya diskon tarif listrik 50% kepada pelanggan rumah tangga daya hingga 2.200 VA selama Januari-Februari 2025.

Menurut dia, diskon tarif listrik justru bisa terkompensasi dengan belanja masyarakat yang meningkatkan inflasi di sektor makanan dan minuman, transportasi dan pakaian jadi.

"Hal ini karena dengan asumsi orang diberikan tarif listrik, uang yang biasa digunakan untuk belanja tarif listrik digunakan untuk keperluan lainnya. Sehingga bisa mendorong permintaan. Tetapi itu tidak terjadi," ujar Bhima.

Sekadar catatan, BPS mencatat inflasi 0,76% secara tahunan (year-on-year/yoy) terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, antara lain: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,69%; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,24%; kelompok transportasi sebesar 0,76%.

Sehingga, Bhima menilai deflasi secara bulanan yang terendah sejak September 1999 dan inflasi secara tahunan yang terendah sejak Januari 2000 lebih disebabkan oleh daya beli masyarakat yang sedang lesu.

Bhima mengatakan setidaknya ada dua preferensi masyarakat yang menyebabkan inflasi rendah. Pertama, masyarakat lebih banyak berhemat dengan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di sektor padat karya di tengah suku bunga tinggi dan pelemahan rupiah. "Itu yang membuat masyarakat meskipun ada diskon tarif listrik, uangnya disimpan dan ditabung."

Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan angka PHK di Indonesia sepanjang 2024 tercatat mencapai 77.965 orang, mengalami lonjakan 20,21% jika dibandingkan periode sepanjang 2023 yang sebanyak 64.855 orang.

Kedua, masyarakat lebih banyak berhemat walaupun ada diskon tarif

listrik untuk mempersiapkan belanja pada momentum Ramadan dan Idulfitri 2025.

"Hal ini karena Ramadan dan Lebaran butuh belanja lebih banyak. Jadi dari sekarang ditabung, belanja Ramadan [diproeksikan] mulai Maret 2025," ujarnya. (blo, ist, wid, rls/dya)

TINGKAT INFLASI YEAR-ON-YEAR (YOY) NASIONAL (2024)

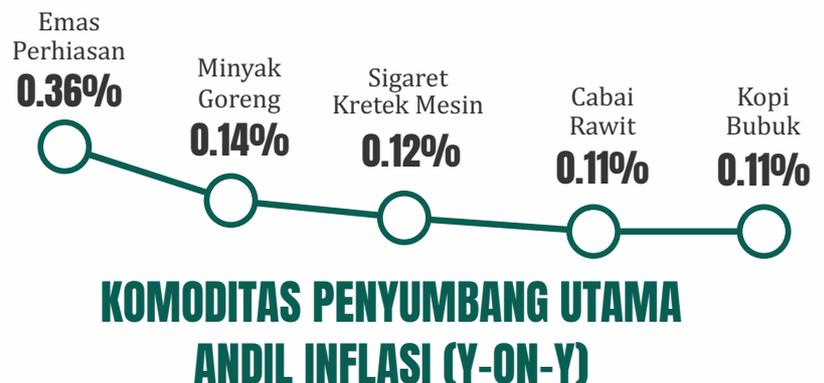
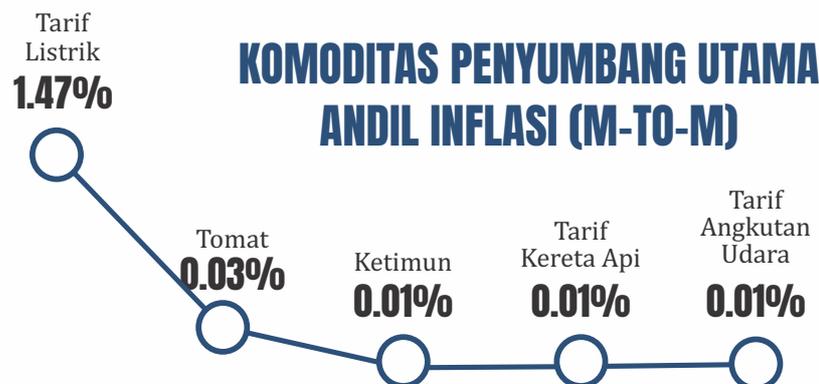


Tahun (Y on Y)
Deflasi 0.76%

Tahun Kalender (Y to D)
Deflasi 0.76%

Bulanan (m to m)
Inflasi 0.76%

Sumber :
Badan Resmi Statistik No. 9/02/Th. XXVIII 03 Februari 2025



Bantah LPG 3 Kg Langka, Bahlil Duga Ada yang Borong dan Mainkan Harga

JAKARTA- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada kelangkaan LPG 3 kg. Namun, ia menduga ada yang memainkan harga dan volume di lapangan.

Bahlil memastikan pemerintah tidak membatasi kuota dan subsidi LPG 3 kg, sama halnya dengan kuota impor LPG yang masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya.

"Saudara-saudara saya di manapun berada, mohon kasih waktu sedikit saja, kami selesaikan ini. Barang enggak ada langka, saya jamin. Saya jamin enggak ada langka," tegas Bahlil saat konferensi pers di Kementerian ESDM, Senin (3/2/2025).

Terkait kemelut kelangkaan LPG 3 kg yang banyak dikeluhkan masyarakat, Bahlil akan mengecek langsung ke lapangan.

"Saya juga tadi sudah diminta oleh Pak Wapres untuk memperhatikan ini. Pak Wapres dan Pak Presiden juga sudah memerintahkan saya untuk mengecek ini secara langsung," kata Bahlil.

Bahlil menjelaskan selama ini alur distribusi LPG 3 kg dari PT Pertamina (Persero) menuju agen, lalu ke pangkalan resmi, dan selanjutnya ke pengecer atau warung-warung kecil. Selama proses itu, ia menduga ada oknum yang memainkan harga.

Seharusnya, kata Bahlil, harga LPG 3 kg itu dibanderol tidak lebih dari Rp 6.000 per kg, sebab pemerintah mensubsidinya hingga Rp 12.000 per kg. Namun, penyaluran komoditas ini tidak tepat sasaran

"Ada satu kelompok orang yang membeli LPG dengan jumlah yang tidak wajar. Ini untuk apa? Harganya naik. Sudah volume yang tidak wajar, harganya pun dimainkan," ungkap Bahlil.

Untuk menertibkan ini, Kementerian ESDM membuat regulasi agar penyaluran LPG 3 kg hanya sampai pangkalan saja, tidak sampai pengecer untuk memangkas rantai distribusinya.

"Beli di pangkalan, karena harga sampai di pangkalan itu pemerintah bisa kontrol. Kalau harga di pangkalan itu dinaikkan, izin pangkalannya dicabut, dikasih denda dan kita bisa tahu siapa pemainnya," jelas Bahlil.

Bahlil mengakui kebijakan ini akan berdampak pada masyarakat yang menjadi lebih jauh mengakses LPG 3 kg dan banyak UMKM yang akhirnya tidak mendapatkan jatah komoditas.

"Cuma persoalannya dari 100 meter, sekarang mungkin jauh lebih dari itu ngambilnya. Mungkin biar



Kelangkaan gas elpiji 3 kg di kalangan masyarakat membuat resah warga di berbagai daerah pada Senin (3/2/2025). Tampak banyak warga yang antri panjang saat akan membeli gas elpiji 3kg tersebut. Ant

transportasinya sedikit yang harus ditambahkan. Kita cari formulasinya. Supaya tujuannya apa? Ini diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak," tutur Bahlil.

DPR Akan Panggil Pertamina

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana memanggil PT Pertamina imbas kelangkaan stok LPG 3 kilogram yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Rencana itu diungkap oleh anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron. Politikus Partai Demokrat itu mengatakan larangan penjualan gas LPG 3 Kg di tingkat pengecer harus ditinjau ulang karena terbukti menyebabkan kelangkaan.

"Kami akan mengundang Pertamina, apakah memang kesalahan itu pada tingkat mata rantai penyalurannya ataupun terhadap aturannya," ujar Herman saat ditemui di Kompleks Parlemen pada Senin (3/2/2025).

Ia menyatakan DPR akan menentukan apa sebenarnya penyebab kelangkaan stok gas melon di pasaran yang membuat masyarakat harus antri mengular.

Herman menyatakan masalah distribusi gas melon tidak bisa digeneralisir disebabkan oleh permainan harga di tingkat pengecer. Mungkin saja, kata Herman, jumlah warung atau pengecer yang mematuhi harga ecer tertinggi (HET) gas LPG 3 Kg lebih banyak dibanding

pelanggarnya.

Oleh sebab itu, Herman berujar Pertamina seharusnya mengetahui apa penyebab aslinya karena perusahaan BUMN itu memegang seluruh data mitra kerja penyalur gas melon. "Pertamina juga harus memiliki tanggung jawab penuh terhadap penyaluran ini sehingga betul-betul tepat sasaran dan tepat harga," Kata Herman menegaskan.

Kendati sudah menjadwalkan pemanggilan PT Pertamina ke DPR, Herman belum mengungkap kapan persisnya tanggal itu. Saat ini, ia menyebut akan mengusulkan jadwalnya ke Komisi VI DPR RI. "Itu akan menjadi salah satu bagian objek di dalam rapat nanti," ucap Herman. Selain meminta penjelasan ke Pertamina, Herman juga mengatakan akan berpesan ke perusahaan pelat merah untuk menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan distribusi gas LPG 3 Kg.

Sebelumnya Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyampaikan bahwa mulai 1 Februari 2025, LPG 3 kg hanya dapat dibeli di pangkalan resmi yang terdaftar di Pertamina. Langkah ini dilakukan untuk memastikan harga yang sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah.

Bagi pengecer yang ingin tetap berjualan, pemerintah membuka peluang untuk mereka menjadi agen resmi dengan mendaftarkan diri

Daftar Kelompok Masyarakat yang Berhak Membeli Gas Elpiji 3 Kg

1. Rumah Tangga

Konsumen yang memiliki legalitas sebagai penduduk dan menggunakan elpiji 3 kg untuk keperluan memasak sehari-hari.

2. Usaha Mikro

Pelaku usaha produktif milik perorangan yang memiliki legalitas sebagai penduduk dan menggunakan elpiji 3 kg untuk mendukung kegiatan usahanya.

3. Petani Sasaran

Petani yang memiliki lahan pertanian dengan luas maksimal 0,5 hektare, kecuali bagi transmigran yang memiliki lahan hingga 2 hektare.

4. Nelayan Sasaran

Nelayan yang telah menerima bantuan paket perdana elpiji untuk kapal penangkap ikan dari pemerintah.

melalui sistem One Single Submission (OSS). Pemerintah juga memberikan masa transisi selama satu bulan hingga Maret 2025 untuk mengubah status pengecer menjadi pangkalan resmi.

Diketahui, kuota elpiji subsidi untuk Jakarta tahun ini sebesar 407.555 metrik ton (MT), lebih kecil dari realisasi penyaluran tahun 2024 yang mencapai 414.134 MT. Faktor lain seperti libur nasional juga mempengaruhi distribusi LPG, karena alokasi stok harus disesuaikan dengan jadwal distribusi yang telah ditetapkan. (din, wid, amt, rls/dya)

KONSUMSI LPG 3 KG DI INDONESIA



*Ket: Kuota APBN | Sumber: Kementerian ESDM

351 Jabatan Kepala Sekolah di Kabupaten Malang Kosong Buntut Minim Guru PNS

MALANG - Kekurangan guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Malang berdampak pada banyaknya jabatan kepala sekolah yang kosong. Saat ini, tercatat 351 posisi kepala sekolah belum terisi, mayoritas di jenjang SD.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang berencana berkonsultasi ke pemerintah pusat guna mencari solusi. Termasuk kemungkinan perubahan regulasi terkait pengangkatan kepala sekolah.

"Iya, kalau ada yang pensiun susah jadinya. Karena kan PNS gak ditambah, tetapi setiap tahun ada pensiun antara 500-900 orang. Sehingga kekurangan terus. Nah ini tergantung kebijakan pusat, kita gak bisa berbuat banyak," ujar Bupati Malang, Sanusi, ditemui di Pendopo Malang, Senin (3/2/2025).

Terkait kemungkinan pengisian jabatan kepala sekolah oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Sanusi menyebut aturan saat ini belum mengizinkan.

Namun, Sanusi mengaku telah meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang untuk berkonsultasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) guna mencari solusi.

Pemkab Malang berharap, jika regulasi memungkinkan, pengisian jabatan kepala sekolah dapat dilakukan lebih cepat. "Ya, sebaiknya bukan tahun ini. Kalau bisa bulan ini sudah dapat izin, kalau sudah ada izin ya secepatnya akan kami lantik lagi," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Malang, Suwadji mengatakan, dari total 1.061 SD yang ada, hanya 633 sekolah yang memiliki kepala sekolah definitif.

"Masih ada 348 kepala sekolah SD yang kosong. Untuk SMP, ada tiga jabatan kepala sekolah yang belum terisi," ujar Suwadji.

Suwadji menjelaskan, dalam pelantikan kepala sekolah pada Senin (3/2/2025) ini, hanya 80 kepala sekolah SD yang mendapatkan promosi, sementara 108 kepala sekolah menjalani mutasi, dan 85 kepala sekolah dikukuhkan kembali setelah masa jabatannya habis.

"Untuk SMP, di kita ada 69 sekolah negeri, definitifnya ada 56. Hari ini, ada 10 kepala sekolah baru yang



Bupati Malang, Sanusi, menandatangani berita acara pelantikan kepala sekolah, Senin (3/2/2025). (Santi/Lenteratoday)

dipromosikan, sementara 30 kepala sekolah mengalami mutasi, dan tujuh lainnya dikukuhkan kembali. Jadi masih ada 3 yang kosong," terangnya.

Menyanggapi instruksi Bupati Sanusi, Suwadji berencana untuk segera mengajukan konsultasi ke pemerintah pusat guna membahas solusi pengisian jabatan kepala sekolah. Menurutnya, aturan saat ini masih menjadi kendala utama dalam pemenuhan kebutuhan kepala

sekolah.

"Saat ini, guru PNS dengan pangkat minimal IIIB yang bisa menjabat kepala sekolah masih terbatas. Sebenarnya, menurut Permendikbud, PPPK boleh menjabat kepala sekolah, tetapi regulasi dari Kemenpan-RB belum memungkinkan. Nah kami ditugaskan untuk berkonsultasi dengan Kemenpan-RB agar ada solusi," jelasnya. (Santi/Dya)

Ketua DPRD Kota Malang Ingatkan Pentingnya Inklusivitas dan Keberlanjutan dalam RKPD 2026



Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnangani Sirraduhita. (Santi/Lenteratoday)

kebijakan yang dihasilkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

"Saya melihat inklusivitas harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan yang tertuang dalam RKPD 2026. Ini penting agar seluruh masyarakat Kota Malang merasakan manfaat dari pembangunan yang direncanakan," ujar Amithya, Senin (3/2/2025).

Untuk diketahui, pembahasan RKPD 2026 telah dimulai sejak 23

Januari 2025 lalu dengan mengangkat tema "Penguatan Transformasi Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing Global."

Fokus utama yang dibahas yakni mendukung terwujudnya transformasi ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

Proses pembahasan ini juga

melibatkan sekitar 250 peserta dari berbagai unsur, termasuk eksekutif, legislatif, akademisi, serta komunitas masyarakat.

Perempuan yang akrab dengan sapaan Mia ini menambahkan, keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan RKPD tersebut akan memastikan kebijakan yang diambil mampu menyentuh berbagai sektor, mulai dari sosial, ekonomi, lingkungan, hingga budaya.

Menurutnya, hal ini diperlukan agar Kota Malang dapat menghadapi tantangan pembangunan dengan lebih efektif.

Selain itu, Mia juga memfokuskan pentingnya kesinambungan dalam proses perencanaan RKPD 2026.

Mengingat Kota Malang akan segera dipimpin oleh pasangan kepala daerah baru, ia berharap pembahasan RKPD yang dimulai di bawah kepemimpinan Penjabat Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, dapat diteruskan oleh wali kota dan wakil wali kota terpilih, Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin.

"Karena pinginnya ekonomi

inklusif, yang jelas pertama kali itu sebenarnya kita harus paham potensi di Kota Malang. Jadi sumber-sumber pajak, kemudian retribusi, itu kita harus tahu petanya. Contoh seperti parkir, berapa sih titik parkir yang dimiliki. Kemudian yang kita hasilkan itu berapa, apakah sudah optimal. Seperti itu," jelasnya.

Lebih lanjut, Mia menekankan kebijakan yang tertuang dalam RKPD harus sesuai dengan koridor kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Malang. Dengan begitu, menurutnya program yang direncanakan dapat langsung diimplementasikan tanpa hambatan berarti.

"Pastinya kita melakukan fungsi pengawasan. Nanti akan dibuatkan kerangka besarnya bagaimana pengawasan kita terhadap program turunannya. Apakah sasaran itu lebih diperluas atau disesuaikan dengan kebijakan itu. Yang jelas kita buat dulu kerangkanya seperti apa. Baru nanti akan kami awasi di tahun 2026," pungkasnya. (Santi/Dya)

Trump Gencar Rayu Kanada

Jadi Negara Bagian AS: Tarif Nol

(Ilustrasi) Kanada diincar AS untuk menjadi negara bagian ke-51. (Istimewa)



WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyerukan Kanada untuk menjadi negara bagian AS. Ini semakin meningkatkan ketegangan dengan salah satu sekutu terdekat AS tersebut setelah Trump mengenakan tarif yang tinggi.

Pada Senin (3/2/2025), sambil mengklaim Amerika Serikat membayar "ratusan miliar dolar untuk MENSUBSIDI Kanada," yang tampaknya merujuk pada defisit perdagangan AS dengan negara tetangganya itu, Trump mengatakan "tanpa subsidi besar ini, Kanada tidak akan ada lagi sebagai Negara yang layak."

"Oleh karena itu, Kanada harus menjadi Negara Bagian ke-51 yang Kita Sayangi," tulisnya di platform media sosial Truth miliknya pada Minggu (2/2/2025) waktu setempat. Trump mengklaim langkah tersebut akan menghasilkan "pajak yang jauh lebih rendah, dan perlindungan militer yang jauh lebih baik bagi rakyat Kanada - DAN TANPA TARIF!"

Kanada mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil tindakan hukum di bawah badan internasional terkait untuk menentang tarif bea masuk yang diterapkan Trump dan akan berlaku Selasa besok.

Perdana Menteri Justin Trudeau juga mendorong warga Kanada pada Ahad untuk memboikot sekutu lama mereka setelah memerintahkan tarif pembalasan terhadap barang-barang AS senilai Can\$155 miliar, mulai dari selai kacang, bir dan anggur hingga kayu dan peralatan rumah tangga.

Para pejabat Kanada mengatakan mereka sedang mempersiapkan langkah-langkah untuk membantu dunia usaha yang mungkin dirugikan oleh perang dagang.

Trudeau pada Sabtu (1/2/2025) malam berjanji akan membalas dengan tarif sebesar 25 persen terhadap barang-barang Amerika

tertentu senilai Can\$155 miliar dengan putaran pertama pada Selasa diikuti dengan putaran kedua dalam tiga minggu.

Para pemimpin di beberapa provinsi di Kanada juga telah mengumumkan tindakan pembalasan, seperti penghentian segera pembelian minuman keras di AS.

Gedung Putih belum mengumumkan secara terbuka tindakan apa yang dapat mengakhiri tarif tersebut.

"Sulit untuk mengetahui apa lagi yang bisa kami lakukan, tapi kami jelas terbuka terhadap saran lain yang kami terima," kata duta besar Kanada untuk Amerika Serikat

Kirsten Hillman kepada ABC News pada Ahad.

Reaksi Kanada terjadi dengan cepat, dengan video yang diunggah ke media sosial menunjukkan para penggemar di pertandingan Toronto Raptors pada Ahad mencemooh saat lagu kebangsaan AS dinyanyikan. (AFP,ist/nei)

AS : Bebaskan Terusan Panama dari Pengaruh China

MENTERI Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio telah memperingatkan Presiden Panama Jose Raul Mulino bahwa AS akan mengambil tindakan tegas jika Panama tidak segera mengakhiri pengaruh dan kendali China atas Terusan Panama. Rubio menekankan bahwa AS tidak akan membiarkan China mengendalikan terusan strategis tersebut.

Peringatan itu, seperti dilansir Reuters, Senin (3/2/2025), disampaikan Rubio saat berkunjung ke Panama City, ibu kota Panama, pada Minggu (2/2) waktu setempat. Rubio sempat mendatangi Miraflores Locks di Terusan Panama dalam kunjungannya itu.

Dalam pertemuan dengan Mulino, Rubio menyampaikan pesan dari Trump bahwa kehadiran China melalui perusahaan berbasis di Hong Kong yang mengoperasikan dua pelabuhan di dekat pintu masuk Terusan Panama -- merupakan ancaman terhadap jalur perairan itu dan melanggar perjanjian AS-Panama, yang mengatur soal netralitas yang ditandatangani tahun 1977 silam.

"Menlu Rubio memperjelas bahwa status quo ini tidak dapat diterima dan jika tidak ada perubahan segera, Amerika Serikat harus mengambil tindakan yang

diperlukan untuk melindungi hak-haknya berdasarkan perjanjian," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, dalam pernyataannya.

Tidak disebutkan lebih lanjut soal langkah apa yang harus diambil oleh Panama atau seperti apa bentuk tindakan yang akan diambil AS.

Peringatan Rubio kepada Presiden Panama itu disampaikan setelah Presiden AS Donald Trump mengancam "sesuatu yang sangat dahsyat akan terjadi" jika AS tidak bisa mengambil alih kendali Terusan Panama, yang dibangun oleh Washington pada awal abad ke-20 dan diserahkan kepada pemerintah Panama tahun 1999.

Mulino, setelah melakukan pembicaraan dengan Rubio di Panama City, mengisyaratkan dirinya akan meninjau kembali perjanjian yang melibatkan China dan perusahaan-perusahaan China. Dia juga mengumumkan kerja sama lebih lanjut dengan AS dalam bidang migrasi.

Namun Mulino menegaskan bahwa kedaulatan Panama atas Terusan Panama, yang merupakan jalur air tersibuk kedua di dunia itu, tidak untuk didiskusikan.

Dikatakan oleh Mulino bahwa perjanjian luas antara Panama dan



(Ilustrasi) AS akan mengambil tindakan tegas jika Panama tidak segera mengakhiri pengaruh dan kendali China atas Terusan Panama. (Wikimedia/Discoverwalks)

China untuk berkontribusi pada inisiatif Belt and Road, yang menjadi landasan bagi Beijing memperluas investasi di Panama pada era pemerintahan sebelumnya, tidak akan diperpanjang.

"Kami akan mempelajari kemungkinan penghentian lebih awal," ucapnya.

"Saya tidak merasa ada ancaman nyata saat ini terhadap perjanjian (netralitas), keabsahannya, apalagi penggunaan kekuatan militer untuk membuat perjanjian tersebut," ujar Mulino, sembari mengatakan bahwa penting untuk melakukan pembicaraan tatap muka dengan Trump. (Reuters,ist/nei)

Buah Namnam, Superfood Alami dengan Segudang Khasiat

BUAH namnam (*Cynometra cauliflora*) adalah Buah yang berasal dari wilayah Asia Tenggara ini memiliki bentuk unik dengan tekstur daging yang renyah serta rasa yang sedikit asam dan manis. Meskipun buah tropis yang mungkin kurang dikenal, namun memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu ketahui.

Buah ini kaya nutrisi dan senyawa bioaktif yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh, mulai dari meningkatkan imunitas tubuh hingga menjaga kesehatan kulit.

Berikut ini ulasan tentang kandungan nutrisi buah namnam dan manfaatnya bagi kesehatan.

Kandungan Nutrisi dalam Buah Namnam

Berikut ini kandungan nutrisi utama dalam buah namnam, yaitu:

1. Kandungan air

Buah namnam memiliki kandungan air yang tinggi, mencapai 87,3% untuk menjaga hidrasi tubuh.

2. Protein

Setiap 100 gram buah namnam mengandung sekitar 4,16% protein, yang berperan dalam

perbaikan dan pertumbuhan jaringan tubuh.

3. Lemak

Kandungan lemak dalam buah ini relatif rendah, yaitu sekitar 0,63%, menjadikannya pilihan yang baik untuk diet rendah lemak.

4. Karbohidrat

Buah namnam mengandung sekitar 7,6% karbohidrat, yang berfungsi sebagai sumber energi bagi tubuh.

5. Vitamin C

Buah namnam kaya vitamin C, dengan kandungan mencapai 121,44 mg per 100 mL sari buah. Vitamin C adalah antioksidan kuat yang mendukung sistem kekebalan tubuh dan kesehatan kulit.

6. Senyawa Fenolik

Sari buah namnam mengandung total fenolik sebesar 996,03 mg/L.

Senyawa fenolik memiliki aktivitas antioksidan untuk melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif.

7. Flavonoid

Kandungan total flavonoid dalam sari buah namnam adalah 421,09 mg/L. Flavonoid dikenal memiliki

berbagai manfaat kesehatan karena bersifat antiinflamasi. Selain itu, dilansir dari *Journal of Vocational*

Health Studies, buah namnam mengandung senyawa bioaktif lain seperti tanin dan saponin, yang berkontribusi pada aktivitas antibakteri dan antioksidan.

Manfaat Buah Namnam bagi Kesehatan

Melihat dari kandungan nutrisi dalam buah namnam, berikut ini manfaat kesehatan yang bisa kamu dapatkan:

Memiliki sifat antibakteri

Ekstrak daun dan buah namnam memiliki aktivitas antibakteri terhadap beberapa jenis bakteri patogen, seperti *Escherichia coli* dan *Staphylococcus aureus*. Hal ini karena kandungan senyawa seperti tanin, saponin, dan flavonoid yang memiliki sifat antibakteri.

Mendukung Kesehatan Jantung

Melansir dari *American Heart Association*, kandungan kalium dalam buah namnam dapat mengatur tekanan darah dan menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Selain itu, senyawa antioksidan dalam buah ini mampu mengurangi peradangan pada pembuluh darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. Menjaga Kesehatan Kulit

Manfaat buah namnam berikutnya karena kaya vitamin C.

Vitamin C dapat mendukung pembentukan kolagen. Selain itu, asupan vitamin C dapat menjaga kulit tetap sehat dan mencegah kulit kering.

Menurunkan risiko diabetes

Manfaat buah namnam berikutnya, yaitu menurunkan risiko diabetes. Buah namnam memiliki aktivitas hipoglikemik untuk membantu menurunkan kadar gula darah. Kandungan flavonoid dan saponin dalam buah ini berperan dalam meningkatkan sensitivitas insulin dan menghambat penyerapan gula di usus.

Mendukung kesehatan pencernaan

Kandungan serat dalam buah namnam membantu melancarkan pencernaan, mencegah sembelit, serta menjaga kesehatan usus. Selain itu, kandungan tanin dalam buah ini memiliki sifat anti-mikroba yang dapat mengatasi gangguan pencernaan akibat infeksi bakteri.

Meningkatkan sistem kekebalan tubuh

Vitamin C yang terkandung dalam buah namnam berperan sebagai antioksidan yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya berbagai infeksi.

Selain vitamin C, macam-macam antioksidan lain yang terkandung dalam buah namnam juga dapat mencegah kerusakan sel-sel tubuh dari radikal bebas penyebab berbagai jenis penyakit.

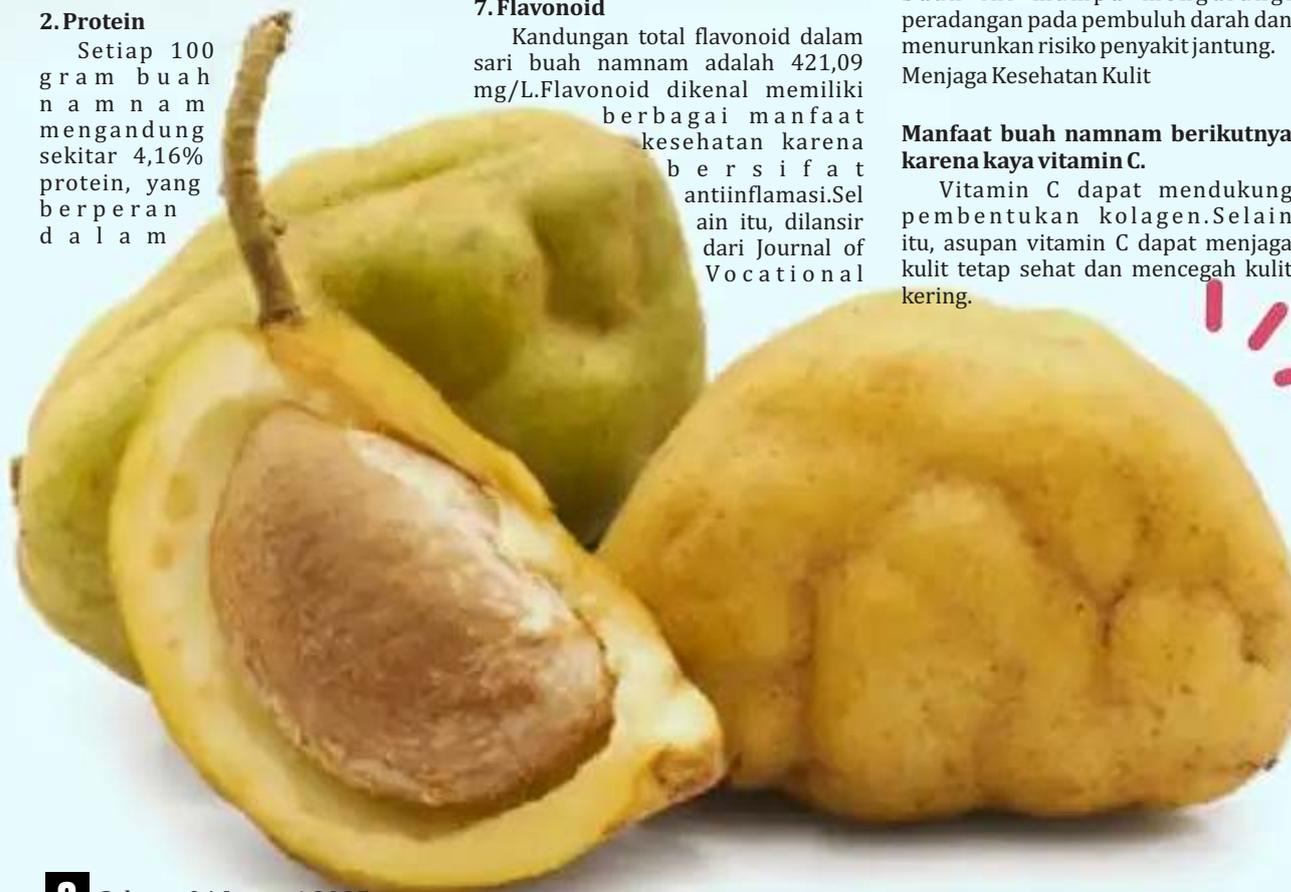
Mengurangi risiko terkena kanker

Manfaat lainnya dari buah namnam adalah mengurangi risiko terkena kanker. Hal ini dikarenakan buah namnam memiliki kandungan antosianin yang tidak hanya melawan radikal bebas, tetapi juga bisa mencegah kerusakan sel-sel tubuh yang dapat memicu terjadinya kanker.

Mengurangi kadar kolesterol

Selain mengurangi risiko penyakit jantung dan kanker, buah namnam juga memiliki manfaat untuk mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh. Hal ini karena tingginya kandungan antioksidan dalam buah namnam yang mampu mengurangi kadar kolesterol yang tinggi.

Menurunnya kadar kolesterol akan mengurangi penumpukan plak yang bisa menyumbat pembuluh darah jantung. (nei,ist/dya)





Superkomputer Tercepat di Dunia Beroperasi Siap Pecahkan Riset Rahasia

CALIFORNIA, AS, kini menjadi lokasi superkomputer tercepat di dunia "El Capitan" yang berada di Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), yang salah satu tugasnya adalah untuk mengerjakan riset rahasia. Superkomputer yang dijuluki El Capitan ini diresmikan pada 9 Januari 2025 lalu, dan merupakan superkomputer exascale ketiga di dunia sekaligus menjadi yang tercepat.

Perangkat dibangun dengan biaya yang tidak sedikit, mencapai 600 juta dolar AS atau sekitar Rp 9,7 triliun (kurs Rp 16.260,8). El Capitan akan mengerjakan berbagai tugas sensitif dan terklasifikasi, termasuk mengamankan dan memantau stok senjata nuklir Amerika Serikat, penemuan material baru, fisika energi tinggi, hingga riset rahasia.

"Pengenalan El Capitan melanjutkan kemajuan kemampuan yang dibutuhkan untuk mempertahankan persediaan kami tanpa kembali ke pengujian nuklir yang eksplosif. Kemampuan komputasi yang didukung oleh data, keahlian dan pengembangan kode selama puluhan tahun, merupakan inti dari pengelolaan persediaan berbasis sains," kata Hruby, wakil menteri Department of Energy (DEO), dikutip IFL Science.

"Kami akan terus berinvestasi dalam infrastruktur teknologi dan ilmiah yang diperlukan untuk mendukung usaha keamanan nuklir."

Superkomputer ini pertama kali dibangun pada Mei 2023, dan mulai



beroperasi pada November 2024. Ia mampu mencapai kinerja puncak sebesar 2,746 exaflops. "Flop" adalah singkatan dari floating point operation per second, dengan operasi floating point sebagai perkalian atau penjumlahan.

Komputer El Capitan dapat melakukan 2,746 x 10¹⁸ flop dan rata-rata 1,472 exaflop. Sebagai perbandingan, Anda memerlukan lebih dari 1.000.000 iPhone 15 Pro yang bekerja secara bersamaan untuk mencapai daya komputasi tersebut.

Ada dua superkomputer lain yang dimiliki AS. Pertama, superkomputer Frontier yang disimpan di Laboratorium Nasional Oak Ridge di Tennessee dan memiliki puncak 2,056 exaflops dan rata-rata 1,353 exaflops. Kedua adalah superkomputer Aurora di Argonne Leadership Computing Facility, dengan rata-rata 1,012 exaflops. Dua-duanya dioperasikan oleh Departemen Energi.

"El Capitan kini memungkinkan para ilmuwan untuk menganalisis apa

yang bagi kebanyakan dari kita merupakan kerumitan yang tak terbayangkan," kata Wali Kota Livermore John Marchand selama acara peresmian. "Ini adalah era baru dalam ilmu komputer, dan Livermore kini menjadi pelopornya."

Komputasi exascale dapat memberikan akurasi yang luar biasa dalam berbagai aplikasi, seperti prakiraan cuaca, pemodelan iklim, hingga pengobatan. Banyak negara dan entitas supranasional seperti Uni Eropa sedang membangun superkomputer, dengan investasi dan rencana selama berbulan-bulan.

El Capitan menjadi komputer tercepat di dunia ketika mulai beroperasi penuh tahun lalu dengan skor 1,742 exaFLOPS dalam uji coba High-Performance Linpack (HPL) benchmark. Ini adalah uji yang digunakan menilai kecepatan superkomputer di seluruh dunia. Hal ini menjadikan El Capitan hanya komputer ketiga yang pernah mencapai kecepatan komputasi

exascale. El Capitan memiliki performa puncak sebesar 2,746 exaFLOPS.

Performa diukur dalam floating-point operations per second (FLOPS), di mana satu floating-point operation adalah perhitungan matematika. Meskipun perbandingan antara perangkat yang sebanding cukup sulit, laptop terbaik biasanya memberikan daya beberapa ratus gigaFLOPS — yang setara dengan 1 triliun (10⁹) FLOPS. Satu exaFLOP setara dengan 1 quintillion (10¹⁸) FLOPS.

Superkomputer tercepat berikutnya di dunia saat ini adalah superkomputer Frontier di Oak Ridge National Laboratory, Illinois. Superkomputer tersebut telah mencapai performa standar 1,353 exaFLOPS dengan puncak 2,056 exaFLOPS.

El Capitan didukung lebih dari 11 juta inti pemrosesan dan grafis yang dikemas dalam 44.544 unit pemrosesan akselerator AMD MI300A — chip yang menggabungkan CPU AMD EPYC Genoa, kartu grafis AMD CDNA3, dan memori komputasi — menurut Next Platform. Setiap chip menggunakan 128 gigabyte memori bandwidth tinggi yang dibagi antara chip unit pemrosesan pusat (CPU) dan chip unit pemrosesan grafis (GPU).

El Capitan dipesan oleh program CORAL-2 Departemen Energi AS untuk menggantikan superkomputer Sierra, yang dipasang pada tahun 2018. Superkomputer tersebut masih digunakan dan merupakan superkomputer paling kuat ke-14 dalam peringkat Top500 terbaru. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | GRESIK: ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | MOJOKERTO: NUR HIDAYAH | LAMONGAN: L HANDI | BLITAR: ARIEF SUKAPUTRA | KEDIRI: GATOT SUNARKO | JOMBANG : SUTONO | PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO : IMAN SANTOSO | BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI: PURCAHYONO JULIATMOKO | MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN I TRENGGALEK: TINA W I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I DKI JAKARTA: FUAD HASSAN I LOMBOK BARAT: MUHAYYAN I PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI

MEDIA TERVERIFIKASI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | MARKETING COMMUNICATION JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I SEKERTARIS FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN I ALAMAT REDAKSI JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I TELP 03187854491 I PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I TELP IKLAN 031-87854491 I NIB 91205006801134 I HARGA IKLAN RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.



Ghost Lashes Jadi Andalan Makeup Minimalis ala Gen Z

TREN kecantikan terus berkembang dan berubah. Di awal tahun 2025 ini, kita sudah melihat beberapa tren baru yang populer di kalangan Gen Z, salah satunya adalah ghost lashes.

Tren ghost lashes merupakan tampilan bulu mata yang tampak sangat natural meski telah menggunakan maskara.

Tampilan ini disebut ghost lashes yang secara harfiah bermakna bulu mata hantu, karena efek dari penggunaan maskaranya yang hampir tidak terlihat. Tren ini sangat berbeda jauh dengan tampilan bulu mata panjang dan dengan lengkung dramatis yang juga populer beberapa tahun ke belakang.

Disebut 'ghost' karena efeknya hampir tidak terlihat, berbeda dengan tren bulu mata tebal dan dramatis yang populer sebelumnya. Tren yang satu ini mirip dengan konsep no-makeup makeup yang menonjolkan kecantikan alami.

Belakangan ini banyak orang yang memang lebih menyukai tampilan yang sederhana namun tetap menarik. Tren ghost lashes memungkinkan setiap orang untuk mengekspresikan diri dengan cara yang lebih natural dan autentik. Selain itu, dengan mengurangi penggunaan maskara, risiko smudge atau gumpalan berkurang, dan bulu mata

mendapatkan waktu istirahat dari paparan produk kosmetik.

Menurut makeup artis profesional asal AS, Manuel Espinoza, tren ghost lashes ini sangat mirip dengan konsep makeup no makeup yang memperlihatkan kealamian. "Ghost lashes sangat mirip dengan tampilan makeup no makeup, yang benar-benar berfokus pada peningkatan bulu mata alami dengan cara yang hampir tidak terlihat," ujar Manuel seperti dikutip dari Real Simple.

Sementara itu, penata rias lainnya yang berasal dari Houston, Texas, Tonya Riner menyebut tren ghost lashes sebagai titik balik yang menonjolkan sifat alami di dunia kecantikan. Ghost lashes disebut akan mengurangi dominasi tren penggunaan maskara tebal. "Bulu mata yang bersih, polos, atau nyaris tak terlihat memberikan kesan individualitas yang memungkinkan bagian riasan lainnya juga ikut on point," imbuh Tonya.

Cara mendapatkan tampilan ghost lashes

Sebenarnya, cara paling mudah untuk mendapatkan tampilan bulu mata tipis adalah dengan tidak menggunakan produk sama sekali. Namun jika kamu masih menginginkan sedikit perubahan pada

tampilan bulu mata, beberapa cara berikut bisa dicobanya:

Manfaatkan eyeliner

Untuk mendapatkan bulu mata dengan efek lebih panjang, kamu bisa melakukan teknik tightlining menggunakan eyeliner. Caranya, kamu cukup mengoleskan eyeliner pada ujung-ujung bulu mata untuk mendapatkan kesan berkilau yang lembut.

Serum bulu mata

Kehadiran serum ini tentu bertujuan untuk menyehatkan bulu mata. Tapi beberapa produk juga dilengkapi dengan formula yang dapat menimbulkan efek panjang dan lengkung alami yang relevan dengan konsep ghost lashes.

Maskara bening

Penggunaan maskara dengan warna clear atau bening tidak akan meninggalkan kesan tebal dan gumpalan seperti pada produk maskara berwarna. Karenanya, pemakaian maskara bening akan menghasilkan tampilan bulu mata alami.

Maskara iron

Penggunaan maskara iron atau maskara dengan ujung besi tanpa

spoolie juga akan memberikan efek yang lebih natural karena hanya sedikit produk yang menempel pada aplikatornya. Kini sudah tersedia beberapa brand makeup yang memiliki jenis maskara ini lho, Ladies.

Penggunaan Eyeshadow

Mengaplikasikan eyeshadow gelap pada akar bulu mata untuk menciptakan ilusi bulu mata yang lebih penuh tanpa maskara.

Poin pentingnya adalah kamu perlu mulai memberikan perawatan ekstra untuk bulu mata, agar bisa tumbuh dan tebal dengan alami. Mulai dari penggunaan serum bulu mata, hingga membersihkan riasan mata dengan pembersih khusus riasan mata tanpa menggosoknya terlalu keras.

Benefit ghost lashes

Tidak mengherankan bahwa ghost lashes menjadi favorit dan menarik perhatian karena kesegarannya, serta daya tarik kesederhanaannya. Pasalnya, mengaplikasikan ghost lashes dapat membuat penampilan tetap minimalis, namun kelentikan bulu mata tetap terjaga. "Dengan melewatkan penggunaan maskara dapat menghilangkan risiko smudge, serpihan, atau gumpalan, sekaligus menyederhanakan tampilan. s(nei,ist/dya)

Dosen Tuntut Tukin, ... (dari Hal 1)

DOSEN ASN Kemendikstisaintek seluruh Indonesia menuntut pembayaran tunjangan kinerja (tukin) dosen 2020-2024 dicairkan. Hal itu diuraikan dalam aksi damai di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).

Aksi tersebut diawali dengan long march dari Patung Kuda Monas hingga Istana Negara.

Ketua Aliansi Dosen Kemendikstisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) Anggun Gunawan, mengatakan ada dua tuntutan dalam aksi damai kali ini.

"Pertama, kami mendesak Pemerintah membayarkan tukin dosen ASN Kemendikti Sainstek yang belum dibayarkan dari tahun 2020. Yang kedua, kami menuntut anggaran dan pencairan tukin tahun 2025 untuk semua dosen ASN Kemendikti Sainstek tanpa adanya pembedaan dosen PTN Satker, Badan Layanan Umum (BLU), dosen Berbadan Hukum (BH) serta dosen-dosen DPK yang diperbantukan di PTS," ujar Anggun.

Ia berharap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendengar aksi yang mereka gelar.

"Dan kalau tidak, maka kami akan mengambil langkah yang lebih tinggi lagi levelnya, yaitu teman-teman sudah menyuarakan untuk aksi mogok nasional. Semua dosen itu akan berhenti mengajar, memberikan pelayanan kepada mahasiswa, sampai pemerintah berkomitmen untuk membayarkan tukin kami," kata Anggun di lokasi, Senin, 3 Februari 2025.

Selain mengancam mogok massal, Anggun menjelaskan pihaknya juga akan mengajukan gugatan ke PTUN apabila Tukin dari tahun 2020 tidak dibayar oleh pemerintah.

"Yang kedua adalah, kami akan tetap berjuang untuk pemerintah membayarkan tukin dari tahun 2020. Dan kalau misalnya tidak ada itikad baik dari pemerintah, kami akan maju ke PTUN," ucap dia.

Lebih jauh, Anggun mengatakan bahwa ada kurang lebih 80.000 dosen yang belum dibayarkan tukinnya oleh pemerintah. Ia pun meminta agar pemerintah membayarkan Tukin untuk keseluruhan dosen, bukan hanya beberapa saja.

Kementerian mengatakan bahwasanya mereka hanya punya uang Rp 2,5 T. Kalau kita hitung, itu hanya bisa meng-cover sekitar 30.000 dosen. Sementara keseluruhan jumlah dosen yang ada itu sekitar 80.000 Bapak-Ibu semuanya. Jadi kami ingin tukin for all buat semuanya. Bukan hanya separuh, bukan hanya sepertiga. Itu yang pertama," tandas dia.

Pakar kebijakan publik Universitas

Airlangga (Unair) Prof Dr H Jusuf Irianto Drs M Com mengatakan masalah tukin dosen terkait dengan urusan legal formal dan proses birokrasi yang belum rampung.

Jusuf menjelaskan pembayaran tukin diatur dalam UU No 15 Tahun 2014 tentang ASN. Aturan turunannya yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) No 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN sebagai dasar pembayaran tukin dosen ASN.

Namun, selain PermenPANRB No 6 Tahun 2022, ia mengatakan perlu peraturan presiden (perpres) agar anggaran tukin dosen dapat dialokasikan. Perpres dan PermenPANRB lalu harus dilengkapi dengan dokumen petunjuk teknis (juknis) proses pencairan tukin.

"Nah, rangkaian proses legal formal inilah yang belum tuntas di kementerian. Jadi, para dosen ASN harus bersabar karena sekarang masih sedang dalam tahap penyelesaian," kata Jusuf dalam keterangannya.

Ketidakpastian kebijakan tukin dosen ASN Kemendikstisaintek menurut Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unair ini berisiko memengaruhi kinerja dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi.

"Ketidakpastian akibat kebijakan yang ruwet dan tidak well-prepared (tidak disiapkan baik) merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai secara umum," kata Jusuf.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) No. 447/P/2024, dosen ASN seharusnya mulai menerima tukin pada awal 2025. Perubahan nomenklatur Kemendikbudristek ke Kemendikstisaintek menurutnya turut berdampak. Jusuf mengatakan peraturan yang tidak disertai Perpres membuat tukin tidak dapat dibayarkan.

"Perbedaan nomenklatur inilah yang membuat keruwetan dalam pembayaran tukin," jelasnya.

Ia mengatakan Pemerintah perlu segera menyelesaikan peraturan terkait yang dibutuhkan agar tukin dapat cair pada 2025.

"Pemerintah harus menunjukkan jati diri sebagai regulator yang berwibawa dengan membuat aturan yang jelas dan benar serta dapat diimplementasikan lebih efektif dan menghindari simpang siur," kata Jusuf.

Tegaskan Tak Bisa Dirapel

Terpisah, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikstisaintek) Togar M.

Simatupang menegaskan pembayaran tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN dalam kurun waktu 2020-2024 tidak bisa dirapel pada tahun ini atau waktu yang akan datang.

Hal ini diungkapkannya dalam menanggapi adanya pemberitaan terkait pembayaran tukin guru dan dosen ASN di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) pada 2021 lalu, dimana pembayaran tukin tersebut merupakan rapelan dari tukin terutang pada periode 2015-2018.

"Kalau di Kemenag, mereka menjalankan proses birokrasi dan dianggarkan, jadi masih bisa dilanjutkan kalau ada kekurangan. Hal yang ceritanya berbeda dengan tukin yang ada di lingkungan Dikti," kata Togar, Swini (3/2/2025).

Togar memaparkan tukin untuk dosen ASN Kemendikstisaintek pada periode 2020-2024 tidak bisa dicairkan sebab pada masa tersebut tukin dosen ASN tak pernah dianggarkan.

Ia menyebut hal ini tidak memenuhi proses birokrasi atau kepatuhan yang lengkap, serta tak dapat diulang akibat tutup buku.

"Tanpa menafikan perjuangan, demikian kenyataan yang terjadi. Perjuangan sudah dilakukan dan itu di luar dari jangkauan otoritas yang ada," ujarnya.

Sebagai gantinya Togar menekankan ajuan tukin bagi dosen ASN pada 2025 ini telah dianggarkan dan disetujui nominalnya sebesar Rp2,5 triliun oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.

Terkait perkiraan kapan pembayaran tukin bisa diselesaikan, ia menyebut pihaknya kini sedang dalam proses untuk melakukan pembayaran tukin dosen ASN 2025.

"Prosesnya sedang berjalan dan proses birokrasi dicoba untuk dipenuhi," katanya.

Oleh sebab itu Togar meminta kepada seluruh dosen ASN untuk tetap menyampaikan aspirasi melalui kanal yang tersedia secara objektif.

"Kami tetap memantau perkembangan, mengingatkan agar menjaga marwah dan citra ASN secara keseluruhan, dan memintakan pimpinan untuk menyampaikan informasi yang akurat tentang tukin dan mengecek kepatuhan ASN sebagai panutan," tutur Togar M. Simatupang.

Terkait ancaman aksi mogok massal, dikatakannya tidak mencerminkan kewibawaan seorang ASN. Sebaiknya para dosen tetap menjaga marwah seorang ASN.

"ASN sebaiknya mengambil jalan yang berwibawa dan menjaga marwah ASN secara keseluruhan, bukan dengan cara-cara yang kurang arif dan mau menang sendiri," kata Togar.

Togar menegaskan, keputusan

penetapan dan pemberian tukin juga telah melibatkan persetujuan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan DPR RI. Sehingga dia meminta kepada seluruh dosen ASN untuk tidak bertindak gegabah. Apalagi dengan adanya keterbatasan ruang fiskal.

"Sebaiknya memikir dua kali, bahwa itu bukanlah keputusan Kemdikstisaintek sendiri, tetapi dilakukan dengan kementerian lain dan DPR," tuturnya.

"Sudah dijelaskan ada keterbatasan ruang fiskal, jadi baru itu kebijakan yang optimal saat ini," sambungnya.

Sementara, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan DPR akan sangat serius dan proaktif dalam menjawab aspirasi para dosen terkait dengan tunjangan kinerja (tukin).

"Komisi X pasti akan membuka ruang dialog dengan perwakilan atau asosiasi dosen untuk mendengarkan secara langsung keluhan dan tuntutan mereka," kata Hetifah.

Dialog tersebut sangat penting untuk memahami akar permasalahan apakah terkait dengan kendala regulasi, ketidakcukupan besaran tunjangan, atau masalah administratif lainnya. Mengatasi ketidaksesuaian atau kelemahan dalam kebijakan pemerintah terkait dengan tukin itu, Komisi X tentu merekomendasikan perbaikan kepada pemerintah, khususnya Kemendikti-Sainstek Kemenkeu, dan K/L lain yang terkait. (din wid, ant, rls/dya)

**LATAR BELAKANG
POLEMIC TUKIN DOSEN ASN**

- Polemik dimulai pada 2020 ketika Kemendikbud Ristek tidak mengajukan anggaran Tukin ke Kemenkeu.
- Hal ini berlanjut hingga 2024, menyebabkan tidak ada dasar hukum untuk pembayaran Tukin selama periode tersebut.
- Pada 15 Desember 2022, Kemendikbud Ristek mengeluarkan Surat No B/1245/M.SM.02.00/2022 tentang persetujuan Kelas Jabatan Dosen ASN.
- Sejak 2020, kementerian pendidikan tinggi tidak mengajukan alokasi anggaran tukin dosen ASN, dan surat serta pengajuan terkait tidak ditindaklanjuti.
- Pada 2014, Presiden Jokowi memisahkan pendidikan tinggi, membentuk Kemendikstisaintek, lalu kembali mengintegrasikan ke Kemendikbud pada periode kedua pemerintahannya. Pada 2021, kementerian ini berganti nama menjadi Kemendikbudristek.
- Sembilan hari sebelum masa jabatannya berakhir, Nadiem Makarim menerbitkan Keputusan No 447/P/2024 tentang pemberian tukin untuk dosen, namun tanpa persetujuan anggaran dari Kemenkeu, sehingga tidak dapat diimplementasikan.



DPRD Surabaya Dukung Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis saat Ramadan

Arif Fathoni: Menu Fleksibel Dibawa Pulang, Ajarkan Toleransi

SURABAYA- Jelang Bulan Ramadan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya mendukung rencana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan. Selama umat Islam melaksanakan ibadah puasa, menu diharapkan dilakukan modifikasi dan bisa dibawa pulang.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni mengusulkan menu fleksibel seperti menyediakan susu kemasan, buah dan kurma yang bisa dibawa pulang oleh siswa.

"Di bulan Ramadan, jam belajar siswa biasanya berubah. Karena itu, saya berharap agar MBG diberikan dalam bentuk yang lebih fleksibel. Misalnya, susu kemasan, buah atau kurma yang bisa dibawa pulang oleh siswa untuk berbuka puasa bersama keluarga," ujarnya, dikutip Senin (3/2/2025).

Diketahui, Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadan 1446 H/2025 M pada Sabtu, 1 Maret 2025. Sementara, Nahdlatul Ulama (NU) belum mengumumkan 1 Ramadan 2025, menunggu hasil rukyatul hilal (pemantauan hilal).

Menurut Arif, konsep baru membawa pulang makanan bergizi bisa mendedukasi soal toleransi ke siswa. Terutama ke siswa non-muslim agar menghargai pelajar yang menjalankan ibadah puasa.

"Di sekolah-sekolah ada siswa yang non-muslim. Dengan membawa pulang makanan dari MBG, mereka tetap bisa menikmatinya bersama keluarga tanpa terpengaruh jadwal berbuka puasa. Itu adalah bentuk pembelajaran toleransi yang bisa kita tanamkan sejak dini," ujar Arif Fathoni.

Di sisi lain, keberlangsungan Program MBG bisa tetap mendukung perekonomian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai penyedia.

"Program itu harus kita lihat sebagai roda penggerak ekonomi. Jika makanan atau minuman yang diberikan berasal dari UMKM lokal, maka secara langsung program itu bisa membantu meningkatkan pendapatan keluarga mereka," tuturnya.

Diketahui, Program MBG di Surabaya dimulai sejak Senin



Siswa menikmati menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Surabaya. (Dok.HumasSBY)

(13/1/2025), dengan sasaran sepuluh sekolah perwakilan tiap jenjang dari PG dan TK, SD, SMP, serta SMA dan sederajat.

Lahirkan Generasi Unggul

Pelaksanaan MBG di Kota Surabaya sejauh ini, menurutnya minim hambatan. Jika di daerah lain ditemukan kasus keracunan hingga rasa makanan yang kurang lezat, Kota Surabaya cenderung tak ada keluhan yang berarti.

Politikus Golkar itu mengatakan, program MBG tersebut memiliki banyak fungsi. Pertama, membangun Sumber Daya Manusia (SDM) jangka panjang untuk membentuk generasi unggul. Sehingga mampu menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan maksimal. Selain itu, adanya MBG juga mampu memutus disparitas kecukupan gizi terhadap seluruh anak di Indonesia.

"Program ini juga menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi di seluruh kabupaten dan kota. Syaratnya, beberapa unsur penting harus dilibatkan dalam pelaksanaannya," ungkap Fathoni.

Unsur penting tersebut yakni UMKM setempat di sekitar sekolah berada, sehingga bisa memotong biaya distribusi. Dengan biaya distribusi yang minim, maka keuntungan penyedia bahan dan jasa akan lebih

tinggi. Tentunya, tanpa mengurangi kebutuhan gizi dan nutrisi pada tiap porsinya. Selain itu, kantin sekolah juga harus dilibatkan.

"Ini untuk memutar pertumbuhan ekonomi. Sehingga UMKM setempat dan kantin sekolah mesti dilibatkan. Karena jika hanya melibatkan layanan catering besar, maka ekonomi hanya akan berputar di lingkup makro," tutur Fathoni.

Beberapa harapan terus dilambungkan Fathoni agar kelangsungan MBG kedepan senantiasa berjalan lancar. "Di tahap uji coba ini, pemerintah memang harus lebih banyak mendengar. Baik dari kalangan siswa maupun pengamat gizi dari masing-masing kabupaten/kota," ungkapnya.

Meski keseluruhan pelaksanaan uji coba MBG di-handle oleh BGN, Fathoni mendorong Pemkot Surabaya untuk senantiasa proaktif dalam mengawasi prosesnya. Terlebih, Pemkot sudah berpengalaman dalam program permakanan. Sehingga sudah memiliki database terkait UMKM setempat penyedia makanan.

"Jadi nanti Pemkot bisa memperkirakan UMKM terdekat dari sekolah sebagai penyedia makanannya. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi bakal merata," ujar Fathoni.

Dilanjutkan Fahtoni, BGN dan Pemkot perlu berkolaborasi agar

kelancaran MBG ke depan terus tercapai. Kolaborasi tersebut juga diperlukan untuk mengawasi makanan. Baik saat pengecekan kualitas, higienitas, hingga pengolahannya.

Fathoni memastikan, dewan bakal mendukung program tersebut. Terlebih, tujuannya untuk membentuk generasi unggul dan memutar pertumbuhan ekonomi. Bahkan, Pemkot dan DPRD telah menyiapkan anggaran Rp 1,1 Triliun untuk mendukung MBG.

"Saya berharap, kedepan, program ini berjalan lancar dan memberikan multiple effect yang baik di semua lini," pungkask Fathoni. (Adv, Ama/Dya)



Di sekolah-sekolah ada siswa yang non-muslim.

Dengan membawa pulang makanan dari MBG, mereka tetap bisa menikmatinya bersama keluarga tanpa terpengaruh jadwal berbuka puasa. Itu adalah bentuk pembelajaran toleransi yang bisa kita tanamkan sejak dini."

ARIF FATHONI
Wakil Ketua DPRD
Kota Surabaya